

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas keuangan nasional harus tercermin dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran daerah dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat tetapi tetap melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Dalam pemerintahan, setiap instansi harus merencanakan kegiatannya. Rencana kerja tersebut sudah termasuk rencana kegiatan yang bertujuan supaya setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan benar dan sejalan dengan rencana kerja yang telah dibuat.

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan kegiatan atau program pelayanan kepada masyarakat tidak dapat melaksanakannya tanpa adanya anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat dengan APBD) merupakan salah satu instrument kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dengan DPRD), serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat dengan PERDA). APBD merupakan instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Tujuan dari APBD itu sendiri adalah pembangunan dan pertumbuhan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah menentukan kebijakan departemen anggaran belanja dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tanpa adanya bantuan luar negeri, yang artinya total belanja tidak boleh melebihi total penerimaan (surplus).

Dengan demikian, dapat menjadi salah satu strategi oleh organisasi perangkat daerah, termasuk Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menyusun anggaran. Anggaran ini menjadi hal penting karena digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah disusun untuk periode tertentu. Untuk mengkoordinasikan semua bagian organisasi dengan berbagai program yang akan dilaksanakan, organisasi perangkat daerah ini akan menyusun strategi-strategi agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensinya agar program tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

Menurut Mahmudi (2010) pengertian anggaran yaitu, “budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.

Anggaran adalah sejenis rencana keuangan masa depan, yang mencakup ekspektasi manajemen atas pendapatan, pengeluaran, dan transaksi keuangan lainnya dalam satu tahun. Tahap penganggaran merupakan tahapan yang sangat penting karena anggaran yang tidak efisien dan tidak berorientasi kinerja justru akan menghambat rencana yang telah disusun sebelumnya. Tanpa anggaran, efisiensi, efisiensi dan tujuan akan sulit dicapai. Proses penganggaran adalah proses penyusunan rencana kerja untuk batas waktu unit moneter. Anggaran harus bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi, serta harus memperhatikan keadilan dan kepatuhan, yang merupakan persyaratan fungsi distribusi dan fungsi distribusi dalam APBD.

Pemerintah telah melibatkan setiap unit kerja dalam penyusunan anggaran untuk setiap SKPD yang menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau RKA SKPD. Masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan telah membuat sasaran terhadap anggaran tersebut. Namun apabila suatu instansi tidak dapat mempersiapkan anggaran dengan baik dan tidak memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam proses penganggaran, maka belanja instansi tersebut tidak akan terealisasi dengan baik. Selain itu, tujuan anggaran harus dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan kebijakan, sehingga kegiatan dan pengeluaran yang direncanakan dapat terwujud dengan sempurna agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat di masa yang akan datang. Kegagalan dalam penanganan anggaran akan menghambat kelancaran kegiatan sehari-hari, oleh karena itu penyusunan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu pimpinan dalam menjalankan fungsinya sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Salah satu perencanaan yang sangat penting adalah penyusunan anggaran belanja daerah pada pemerintahan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah harus dipersiapkan dengan baik dan dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Begitu pula dalam pelaksanaannya harus diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan. Anggaran belanja daerah yang disusun dalam satu tahun anggaran mencakup semua belanja anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah selama tahun anggaran tersebut serta semua perhitungan antara bagian anggaran dan bagian urusan kas. Pelaksanaan anggaran belanja daerah harus berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan. Integrasi program rutin dan pembangunan perlu dicapai untuk mendapatkan hasil yang optimal, sehingga dapat dicegah terjadinya tumpang tindih atau duplikasi pembiayaan yang dapat mengakibatkan pemborosan dana.

Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengusunan anggaran adalah dengan membuat Laporan Realisasi Anggaran. Laporan ini tentang realisasi pelaksanaan anggaran harus dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode, sehingga dapat diketahui penyimpangan dan sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan penilaian tentang sukses atau tidaknya kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya pada waktu yang bersangkutan. Hal ini bisa dijadikan evaluasi untuk perbaikan kinerja kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui proses penganggaran dan capaian anggran realisasi pada organisasi perangkat daerah Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Laporan realisasi anggaran organisasi sektor publik dapat membantu mencapai akuntabilitas. Serta ikhtisar pencapaian kinerja yang terjadi dalam laporan keuangan dan disusun pada periode yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan pentingnya penyusunan anggaran pada suatu kerja pemerintah dan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban pengguna anggaran kepada masyarakat, maka penulis melakukan praktek kerja lapangan / magang dan penelitian pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENYUSUNAN DAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang di atas, untuk menyelesaikan masalah yang akan ingin dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penganggaran pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana laporan dan realisasi anggaran belanja pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera

Barat?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan capaian anggaran belanja pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan penulisan yaitu:

1. Mengetahui prosedur penyusunan anggaran pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui laporan dan realisasi anggaran belanja pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

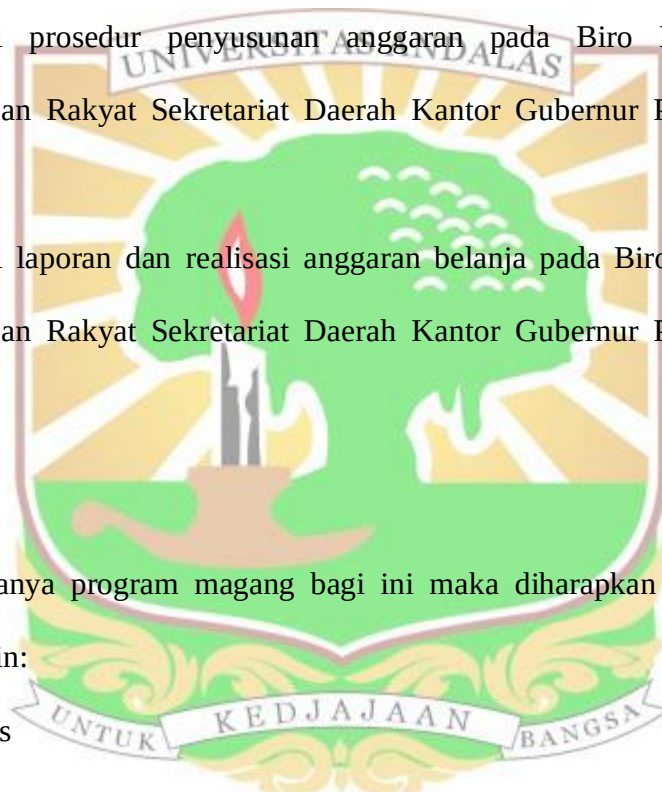
1.4 Manfaat

Dengan adanya program magang bagi ini maka diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan menambah informasi wawasan dan pengetahuan tentang ketentuan- ketentuan lainnya dalam kegiatan khususnya sistem prosedur realisasi anggaran pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan kantor Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- b. Bagi Pembaca



Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi mengenai masalah- masalah yang terkait dengan realisasi anggaran belanja.

c. Bagi Akademik

Sebagai tambahan referensi penulisan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Andalas mengenai realisasi anggaran belanja.

1.5 Tempat dan Waktu

Adapun Tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat , untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan/ magang selama 40 hari kerja, yang di mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai 5 Maret 2021 yang hari kerjanya yaitu dari hari senin s/d jumat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan magang ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menggambarkan tentang tinjauan perpustakaan atau segala sesuatu yang akan menjadilandakan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL INSTANSI

Berisi penjelasan mengenai Sejarah singkat, Visi dan Misi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan hasil studi lapangan berupa laporan selama di Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa mendatang berdasarkan hasil pengamatan dari pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan penulis.

